

Apakah Kreativitas dan Sikap terhadap Ilmu Ekonomi Meramalkan Partisipasi Politik Mahasiswa? Peran Mediasi Efikasi Politik pada Mahasiswa di Malang, Jawa Timur

Juneman Abraham¹ dan Diantini Ida Viatrie²

1. Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara, Jakarta 11480, Indonesia
2. Fakultas Pendidikan Psikologi, Universitas Negeri Malang, Malang 65145, Indonesia

E-mail: juneman@binus.edu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan mekanisme psikologis dari partisipasi politik mahasiswa. Desain penelitian ini adalah desain korelasional prediktif, dengan teknik analisis data berupa analisis jalur (*path analysis*). Variabel dependen adalah Intensi Partisipasi Politik. Variabel prediktor adalah Kreativitas dan Sikap terhadap Ilmu Ekonomi. Variabel mediator adalah Pengalaman Berpolitik yang Diperlukan (*necessary political experience*) dan Efikasi Politik (*political efficacy*). Penelitian ini mengambil sampel 104 mahasiswa Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, Jawa Timur ($M_{usia} = 19,50$ tahun; $SD_{usia} = 2,397$ tahun). Ditemukan bahwa kreativitas dan sikap terhadap ilmu ekonomi mampu meramalkan intensi partisipasi politik mahasiswa melalui mediasi efikasi politik dan pengalaman berpolitik yang diperlukan ($Chi-Square = 8,24$, $df = 5$, $P-value = 0,14349$, $GFI = 0,97$, $RMSEA = 0,08$).

Are Creativity and Attitude toward Economics able to Predict Students' Political Participation? The Mediating Role of Political Efficacy among Students in Malang, East Java

Abstract

This research aims to find the psychological mechanism of students' political participation. The research was designed with predictive correlational design and the data analysis technique was path analysis. The dependent variable was political participation intention. The predictor variables were creativity and students' attitude toward economics. The mediator variables were the necessary political experience and political efficacy. One hundred and four students of Department of Psychology, FPPsi, Malang State University, participated ($M_{age} = 19.50$ years old; $SD_{age} = 2.397$ years). The research found that creativity and attitude toward economics are significant predictors for students' political participation intention and this prediction is mediated by political efficacy and the necessary political experience ($Chi-Square = 8.24$, $df = 5$, $P-value = 0.14349$, $GFI = 0.97$, $RMSEA = 0.08$).

Keywords: apathy, economics, efficacy, creativity, political participation

Citation:

Abraham, J., Viatrie, D.I. (2013). Apakah kreativitas dan sikap terhadap ilmu ekonomi meramalkan partisipasi politik mahasiswa? Peran mediasi efikasi politik pada mahasiswa di Malang, Jawa Timur. *Makara Seri Sosial Humaniora*, 17(2), 109-125. DOI: 10.7454/mssh.v17i2.2960.

1. Pendahuluan

Halaman utama harian *Kompas* tanggal 6 September 2013 membeberkan gejala apatisme politik pada masyarakat. *Kompas* telah mewawancarai sejumlah praktisi politik mengenai hal-hal yang menyebabkan apatisme tersebut. Sejumlah alasan yang diidentifikasi

oleh berita harian regional tersebut adalah sebagai berikut ("Apatisme meluas", 2013): pesimisme manfaat dari proses demokrasi, kegagalan partai politik membangun basis pendukung, kualitas kader partai politik, persepsi masyarakat bahwa politik identik dengan korupsi (yang juga dipengaruhi pemberitaan media massa), ketidakbermaknaan ideologi dan program

dalam berita terbaru politik, persepsi tentang irrelevansi negara dalam kehidupan masyarakat, serta proses pemilihan umum yang rumit dan tidak menarik.

Yang memprihatinkan adalah apatisisme mahasiswa di dunia politik (Berindra, 2013). Berindra memaparkan sejumlah contoh, sebagai berikut: (1) mahasiswa tak berminat belajar ilmu politik, (2) mahasiswa menganggap “bikin pusing saja” jika menjadi anggota senat atau badan eksekutif mahasiswa, (3) mahasiswa yang “melek politik” pun tidak mempraktekkan ilmu politiknya dengan penelitian dan partisipasi politik, (4) mahasiswa yang sudah tergabung dalam senat atau badan eksekutif mahasiswa pun menarik diri dari organisasi tersebut karena “bosan” terhadap perdebatan, serta (5) mahasiswa kurang berminat mengubah kondisi masyarakat melalui organisasi kemahasiswaan. Hal ini memprihatinkan karena mahasiswa sering dipandang sebagai kekuatan moral maupun sebagai agen perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Padahal, berpolitik merupakan aktivitas yang efektif dalam mengubah masyarakat, dalam hal ini ke arah kondisi yang lebih sejahtera. Hal ini sejalan dengan definisi “politik” yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

“Politik selalu merupakan suatu kegiatan, keterlibatan, tindakan, daya upaya, praktek atau pelaksanaan nyata yang menangani atau mengubah kenyataan yang dihadapi. Jangkauan dari tindakan tersebut tidak terbatas pada lingkungan kecil, yaitu orang lain, keluarga atau sanak saudara, melainkan menyangkut masyarakat yang lebih luas, yakni seluruh negara atau daerah atau sebagian pokok penting masyarakat yang lebih luas seperti kaum buruh atau desa.” (Müller, 1992:13)

Pengertian “politik” yang senada dengan definisi Müller tersebut diungkapkan oleh Magnis-Suseno:

“Yang menjadi ciri khas suatu pendekatan yang disebut ‘politik’ adalah bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Sebuah keputusan bersifat politik apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Suatu tindakan harus disebut politik apabila menyangkut masyarakat sebagai keseluruhan.” (Magnis-Suseno, 1994:19-20)

Berdasarkan definisi-definisi di atas, partisipasi politik (*political participation*) merupakan tingkat keterlibatan seseorang dalam kegiatan-kegiatan politik, yang antonimnya adalah apatisisme politik (Li & Marsh, 2008). Satu dasawarsa yang lalu, White (2004) mengajukan proposal untuk penambahan diagnosis baru dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM), yakni *Political Apathy Disorder*, dan mengemukakan bahwa ciri mendasar dari apatisisme politik adalah:

“*pervasive pattern of failing to help reduce the suffering of others (particularly the underprivileged, oppressed, and poor) combined with overconsumption of society’s limited resources.*” (White, 2004:48)

Istilah “partisipasi politik” sering disinonimkan, digunakan secara bergantian, atau dipasangkan dengan istilah keterlibatan politik (*political involvement, political engagement*), atau aktivisme politik (*political activism*) (Cicognani, Zani, Fournier, Gavray, & Born, 2012; Esser & de Vreese, 2007; Klesner, 2007; Swank, 2012). Pertanyaan utama penelitian ini adalah: Apa sajakah variabel yang mempengaruhi intensi partisipasi politik mahasiswa, dan bagaimana bentuk model jalur psikologisnya? Pertanyaan ini berangkat dari amatan terhadap artikel-artikel ilmiah di bidang psikologi politik yang masih belum banyak menyajikan mekanisme psikologis dari partisipasi politik mahasiswa. Pertanyaan terbuka ini hendak dijawab oleh peneliti dengan mengikutsertakan variabel-variabel psikologis yang relevan dalam sebuah model penelitian.

Di samping yang dikemukakan dalam berita harian *Kompas*, berdasarkan riset-riset empiris-psikologis yang ada, terdapat sejumlah variabel yang dapat menjelaskan tinggi atau rendahnya partisipasi politik seseorang. Kepribadian diketahui sebagai variabel yang konsisten mempengaruhi partisipasi politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Vecchione dan Caprara (2009) menemukan bahwa sifat kepribadian atau *personality traits* (dalam hal ini: *openness* dengan $\beta = 0,27$, dan *extraversion* dengan $\beta = 0,20$) memiliki kontribusi terhadap partisipasi politik melalui mediasi *political efficacy*. Kontribusinya bahkan mengalahkan nilai prediktif dari variabel-variabel sosiodemografis (dalam hal ini: pendidikan dengan $\beta = 0,04$, usia dengan $\beta = 0,03$, dan penghasilan dengan $\beta = 0,05$) pada taraf $p < 0,01$.

Selanjutnya, Gallego dan Oberski (2012) menemukan bahwa *personality traits* (dalam hal ini: *extraversion, conscientiousness, dan openness*) mempengaruhi partisipasi politik (*voter turnout dan protest participation*) secara tidak langsung melalui mediasi variabel-variabel efikasi politik (*internal political efficacy*), perasaan puas telah melakukan tugas (*sense of duty*), minat, dan identifikasi dengan bangsa. Rincian koefisien regresinya adalah sebagai berikut: *Extraversion* (*loglinear reg coef* = -0,15 sampai dengan 0,27) dan *openness* (*loglinear reg coef* = -4,06 sampai dengan 2,90) berpengaruh terhadap efikasi politik internal. *Conscientiousness* berpengaruh terhadap *sense of duty* dengan *loglinear reg coef* = 0,05. *Openness* berpengaruh terhadap identifikasi dengan bangsa dengan *loglinear reg coef* = -1,55 sampai dengan 0,54. *Openness* berpengaruh terhadap minat berpolitik dengan *loglinear reg coef* = -1,86 sampai dengan 0,59. Seluruh regresi tersebut signifikan pada taraf $p < 0,01$. Ukuran efek (*effect size*) efikasi politik internal terhadap partisipasi politik antara -1,7 sampai dengan 2,35; perasaan tugas terhadap partisipasi politik 0,77; minat berpolitik terhadap partisipasi politik 0,57; dan identifikasi dengan bangsa terhadap efikasi politik 0,22.

Variabel-variabel sosio-kognitif juga mempengaruhi partisipasi politik seseorang. Di atas telah disebutkan bahwa efikasi politik dapat berperan sebagai mediator dalam hubungan tak langsung antara variabel kepribadian dengan partisipasi politik. Hal ini diperkuat oleh temuan Sarfaraz, Ahmed, Khalid, dan Ajmal (2012) yang memperlihatkan bahwa partisipasi politik mahasiswa sangat dipengaruhi oleh keyakinan yang optimistik bahwa keterlibatan mereka dalam politik dapat membuat perubahan di tengah-tengah kelemahan sistem politik yang ada. Keyakinan semacam ini berlawanan dengan *learned helplessness* yang memprediksikan apatisme politik. Keyakinan optimistik itu disebut sebagai efikasi politik. Efikasi politik merupakan *“the belief that a person can produce desired results by her actions”* (keyakinan seseorang dapat memproduksi hasil yang diinginkan dengan tindakannya) (Gallego & Oberski, 2012:428). Gallego dan Oberski menyebutnya sebagai “prediktor klasik” (*classical predictor*) terhadap partisipasi politik, karena tidak sulit dipahami bahwa rasa mampu diri berkorelasi positif dengan partisipasi. Hipotesis pertama (H1) penelitian ini berbunyi: “Semakin tinggi efikasi politik seseorang, maka semakin rendah apatisme politik atau semakin tinggi intensi partisipasi politiknya” (Gambar 1).

Masih berhubungan dengan variabel sosio-kognitif, Cicognani, Zani, Fournier, Gavray, & Born (2012) menemukan bahwa partisipasi politik (dalam hal ini: *voting intentions*) remaja perempuan secara kuat dipengaruhi oleh partisipasi politik orangtuanya. Sementara itu, partisipasi politik remaja laki-laki secara kuat dipengaruhi oleh partisipasi sosial dan kewargaannya (misalnya, keterlibatan dalam organisasi-organisasi komunitas baik formal maupun non-formal, serta kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler), namun pengaruhnya tidak langsung, yakni melalui mediasi perasaan berkemunitas (*sense of community*) dan kepercayaan terhadap pemerintah dan partai politik. Klesner (2007) menemukan bahwa modal sosial (*social capital*), seperti kepercayaan interpersonal, jejaring sosial, dan keterlibatan dan organisasi-organisasi non-politik, merupakan prediktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Selanjutnya, Schoon *et al.* (2010) menemukan bahwa status sosial orangtua dan kemampuan kognitif mempengaruhi sikap politik dan kepercayaan politik orang dewasa melalui mediasi variabel tingkat pendidikan.

Secara khusus pendidikan politik yang merupakan dimensi variabel sosio-kognitif disorot sebagai variabel yang langsung mempengaruhi partisipasi politik. Sebagai contoh, Brown (1996) memberikan anjuran bahwa dengan didukung oleh kajian kepustakaan sistematiknya, agar para perawat (*nurse*) meningkatkan partisipasi politiknya, khususnya dalam kaitannya dengan peran perawat dalam mempengaruhi sistem

politik pemeliharaan kesehatan. Caranya, menurut Brown, adalah melalui kurikulum keperawatan yang didalamnya memasukkan sosialisasi politik (*political socialization*), sehingga nilai-nilai dan keterampilan politik menjadi bagian dari identitas peran profesional (*professional role identity*) dari seorang perawat. Selanjutnya, dengan menggunakan data survey tahun 1952 sampai dengan 2004, Burden (2009) menemukan bahwa terdapat efek yang dinamis dari tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik (*voter turnout*). Tingkat pendidikan formal seseorang dapat memprediksi partisipasi kewargaannya (*civic participation*) dan selanjutnya mempengaruhi partisipasi politiknya. Burden memberikan sejumlah penjelasan, yakni (1) partisipasi dalam kegiatan di kampus selama proses pendidikan dapat mencakup diskusi politik yang mengasah pengetahuan politik dan kewargaan; (2) pendidikan makin bernilai dalam partisipasi politik karena *“politics got harder”* (h. 546), yang berarti bahwa pendidikan, termasuk kurikulumnya, memfasilitasi seseorang untuk mencerna kuantitas dan kualitas isu politik yang makin kompleks; serta (3) orang yang kurang berpendidikan (*less educated*) kini lebih mudah menghindari dari tayangan politik karena banyaknya pilihan media saat ini. Hal senada ditemukan oleh Cole dan Stewart (1996): pendidikan di universitas mempengaruhi identitas politik perempuan kulit hitam dan selanjutnya mempengaruhi aktivisme politiknya. Brussino, Medrano, Sorribas, dan Rabbia (2011) lebih lanjut menemukan bahwa tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi pengetahuan politik seseorang melalui mediasi variabel minat terhadap politik dan efikasi politik internal. Brussino *et al.* menjelaskan bahwa kontak dengan lembaga pendidikan meningkatkan peluang untuk memperoleh dan mengembangkan kemampuan umum (seperti kosa kata) dan kemampuan kewargaan (seperti partisipasi dalam himpunan mahasiswa) serta kemampuan memahami dinamika politik yang abstrak dan kompleks. Orang dengan kemampuan yang kuat dalam hal-hal tersebut mengembangkan aspek motivasional, minat, dan inisiatif yang lebih tinggi terkait politik dan efikasi politik internal.

Secara khusus Rindermann, Flores-Mendoza, dan Woodley (2011) meneliti hubungan dinamis antara inteligensi dan pendidikan dengan orientasi politik. Mereka menemukan bahwa semakin inteligen seseorang, maka ideologi politiknya akan semakin tidak ekstrim (baik ekstrim sayap kanan/konservatif maupun ekstrim sayap kiri/liberal). Hal ini karena orang yang inteligensinya lebih tinggi meyakini bahwa partai-partai politik moderat (poros tengah) lebih mungkin memfasilitasi atau menunjang sistem pendidikan yang membantu perkembangan pendidikan dan pertumbuhan pengetahuan—dua hal yang merupakan minat sosial terpenting dari orang-orang dengan IQ tinggi—dibandingkan dengan partai sayap kanan atau sayap kiri.

Bagi orang-orang yang inteligen, posisi-posisi ekstrim (kiri/kanan) seringkali “menyederhanakan dunia” yang membawa kesulitan untuk individu maupun masyarakat. Posisi ini tidak disukai oleh orang-orang yang lebih inteligen yang mengedepankan rasionalitas dan pertimbangan yang kompleks dalam mengorganisasikan dan menyimpulkan informasi. Rindermann *et al.* juga memberikan penjelasan tambahan bahwa konteks kultural, seperti sejarah pengalaman kehidupan politik di bawah rezim partai dengan ideologi ekstrim mungkin pula mempengaruhi orang-orang yang lebih inteligen untuk lebih waspada dalam menentukan orientasi politiknya.

Variabel-variabel psikodemografis juga diketahui mempengaruhi partisipasi politik. Hopkins dan Williamson (2012) menemukan bahwa persepsi tentang tingkat kepadatan lingkungan pertetangga mempengaruhi partisipasi politik. Serupa dengan mereka, Harkins dan Latané (1998) sebelumnya menemukan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh ukuran populasi, dalam hal mana semakin besar ukuran populasi maka semakin tinggi difusi rasa tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik. Pinkleton *et al.* (2012) menemukan bahwa kepuasan atau juga skeptisisme terhadap pemberitaan politik dari media massa mempengaruhi apatisisme politik.

Seluruh telaah literatur di atas memperlihatkan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh tiga payung variabel, yakni: (1) Kepribadian (khususnya *Big Five personality traits*), (2) Variabel sosio-kognitif (pengetahuan politik, efikasi politik, kepercayaan politik, sikap politik, perasaan kewargaan), serta (3) Variabel psikodemografis (ukuran populasi, kepadatan tetangga, pemberitaan media massa). Dalam hubungannya dengan variabel sosio-kognitif (nomor 2), perhatian yang besar terhadap variabel pendidikan, termasuk di dalamnya kurikulum, nampak digalakkan oleh para peneliti untuk dijadikan variabel dalam penelitian-penelitian tentang partisipasi politik karena hasil-hasil yang konsisten menunjukkan adanya kontribusi pendidikan (Brown, 1996; Brussino *et al.*, 2011; Burden, 2009; Cole & Stewart, 1996; Rindermann *et al.*, 2011).

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan secara khusus menelaah peran dari sikap seseorang terhadap ilmu ekonomi dan juga kreativitas dalam meramalkan partisipasi politik seseorang dalam sebuah model teoretis. Terdapat sejumlah alasan yang mendasar dalam pemilihan variabel-variabel tersebut. Sikap terhadap ilmu ekonomi merupakan dimensi lain dari variabel pendidikan yang belum tersentuh dalam riset-riset mengenai partisipasi politik. Sikap terhadap ilmu ekonomi (*attitude toward economics*)—selanjutnya disingkat: SIE—merupakan evaluasi positif atau negatif seseorang terhadap ilmu ekonomi (Halim, Zaini, & Hilmi, 2009; Phipps & Clark, 1993). SIE merupakan

salah satu sumber yang bersifat akademik (yang diperoleh dari bangku pendidikan formal) yang membentuk sikap ekonomi (*economic attitudes*), yang kental dengan unsur afektif (Soper & Walstad, 1983). Terdapat sejumlah alasan mengapa SIE ditempatkan sebagai prediktor partisipasi politik mahasiswa, khususnya melalui mediasi efikasi politik. Alasan yang paling utama adalah bahwa terdapat saling keterkaitan (interkoneksi) antara politik dan ekonomi, baik pada taraf teoretis maupun praktis. Sebagai contoh, Swanson mengemukakan:

“Although some political scientists unfortunately theorize and investigate political phenomena without much regard for the relationship between economics and politics, many other scholars correctly insist on taking into account this relationship. Yet, even these scholars sometimes employ modes of economic thought that underestimate the diversity and complexity of the ways in which political and economic relations affect each other, including the positive and negative effects various economic practices have on democracy. In this article, I examine the work of Robert Dahl as a case study of just such a scholar, one who is explicitly concerned about the interconnections between economics and politics, but whose theorization of them falls short in several crucial ways. Dahl is a particularly pertinent example of this (inadvertent) tendency to undertheorize economic relations because he has had a significant impact on how other political scientists think about democracy and economics. As a central figure in the discipline, Dahl is widely taught and cited, for instance, by those doing empirical research on democratic institutions in the U.S. and comparatively across nations.... With Charles Lindblom, Dahl condemns the theoretical separation of politics and economics, and therefore seeks to formulate a framework that integrates political and economic theory.” (Swanson, 2007:209)

Kutipan paragraf di atas berasal dari sebuah jurnal ilmu politik, *Polity*, yang menunjukkan bahwa hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik masih merupakan hubungan yang diyakini ada namun bersifat problematis dan terus-menerus diupayakan untuk dirumuskan. Swanson mengulas karya Robert Dahl, seorang ahli ilmu politik yang terkemuka dengan ungkapannya bahwa ketidakadilan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap demokrasi, yakni dapat mengikis prosedur politik demokratik. Lebih lanjut, Swanson menekankan bahwa Dahl mengkritik teori-teori ekonomi yang berkonflik dengan teori-teori demokrasi. Swanson sendiri mengajukan elaborasi atas karya Dahl, dan mengemukakan bahwa “*ekonomisme*” (*economism*)—yang memperlakukan ekonomi sebagai realitas otonom dengan hukum-hukumnya sendiri—telah mengabaikan banyak kondisi konkret politik maupun kultural sebagai konteks dari praktek-praktek ekonomis. Di samping itu, ekonomisme yang demikian menempatkan ekonomi sebagai proses natural dan ahistoris di atas deliberasi dan tindakan politik demokratik. Swanson juga menentang pandangan “*politisasi*” (*politicization*) yang

melibatkan perancangan dan pengaturan kekuasaan dan otoritas sebagai proses yang otonom terlepas dari praktek ekonomis dan konteks kultural. Yang diupayakan baik oleh Swason maupun Dahl adalah sebuah teori *political economy* yang mengkombinasikan baik ilmu ekonomi maupun politik.

Penelitian ini mencoba menerjemahkan hubungan keduanya (ekonomi dan politik) dalam bentuk *hubungan psikologis* antara sikap terhadap ilmu ekonomi dan efikasi politik. Sedemikian eratnya hubungan antara ilmu politik dan ekonomi, sejumlah universitas yang terkemuka dalam bidang ilmu politik, seperti Universitas Leeds dan Universitas York membuka sebuah program studi dengan gelar *B.A. Economics and Politics*. Dalam prospektusnya, Universitas Leeds menyatakan tujuan dan manfaat pendidikannya sebagai berikut (“BA Economics and Politics”, 2013):

“BA Economics and Politics will give you a firm grounding in the institutions and practices of modern political systems, and a critical understanding of the economic issues arising in business, public policy and society at large The course also allows you to develop a deep understanding of the economic factors that influence income, wealth and well-being. You will also learn how scarce resources come to be allocated, distributed and utilised today, and such factors may change in the future.”

Informasi tersebut mengindikasikan bahwa ilmu ekonomi—yang mempelajari bagaimana kemakmuran dan kesejahteraan manusia dicapai melalui pengaturan alokasi dan penggunaan sumber-sumber daya yang langka—mempengaruhi kebijakan publik dan sistem politik modern. Dengan perkataan lain, penguasaan ilmu ekonomi akan memfasilitasi (memberikan efikasi) seseorang untuk melakukan aktivitas politik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Roncaglia (2003) dalam kajian sistematiknya, bahwa sejarah perdebatan pemikiran tentang ekonomi berkorelasi dengan diskursus politik. Lebih lanjut, Roncaglia memberikan jembatan penjelasan bahwa ilmu ekonomi tidak hanya berkenaan dengan teori-teori ekonomi, melainkan juga filsafat ekonomi, pandangan dunia (*world views*), representasi konseptual tentang ekonomi, serta program atau pendekatan riset. “Gagasan-gagasan politik melekat dengan pandangan dunia, dan karenanya secara intrinsik berhubungan dengan penalaran ekonomi *Theoretical arguments concerning the economy have an impact on political discourse*” (Roncaglia, 2003, h. 143). Berdasarkan seluruh pemikiran tersebut, sangat beralasan bila dihipotesiskan hubungan prediktif sikap terhadap ilmu ekonomi dengan efikasi (rasa mampu diri) di bidang politik, yang selanjutnya akan mempengaruhi intensi partisipasi politik. Peneliti menghipotesiskan (H2) bahwa “Semakin negatif sikap seseorang terhadap ilmu ekonomi, maka semakin rendah efikasi politiknya (atau: semakin tinggi apatisme

politiknya). Sebaliknya, semakin positif sikap seseorang terhadap ilmu ekonomi, maka semakin tinggi efikasi politiknya” (Gambar 1).

Efikasi politik juga dapat dikontribusikan oleh pengalaman sebelumnya yang terkait dengan politik, seperti mengambil keputusan dalam rapat, memimpin organisasi non-politik (misalnya, Klesner, 2007), dan sebagainya. Secara teoretis, terdapat bukti-bukti bahwa terdapat korelasi positif antara efikasi dengan pengalaman sebelumnya (*previous related experience*), terutama pengalaman penguasaan (*mastery experience*), baik pada tingkat individual maupun tingkat kelompok (Myers, Feltz, & Short, 2004; Zhao, Seibert, & Hills, 2005). Lebih lanjut, Perrewé *et al.* (2005) menyatakan bahwa keterampilan politik merupakan persepsi dan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan perilakunya terhadap kebutuhan-kebutuhan situasional yang berubah-ubah guna mempengaruhi orang lain. Orang yang memiliki pengalaman sebelumnya terkait politik memiliki perasaan keamanan pribadi yang memungkinkannya memiliki persepsi kendali atas proses dan hasil interaksi politik. Melalui pengalaman yang relevan, keterampilan berpolitik terbentuk dan terasah dan hal ini mempertinggi efikasi politik. Atas dasar hal-hal ini, peneliti menghipotesiskan (H3) bahwa “Semakin banyak dan intens *necessary political experience* (pengalaman berpolitik yang diperlukan) dari seseorang, semakin tinggi pula efikasi politiknya” (Gambar 1).

Sebagaimana dikemukakan di atas, penelitian-penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa inteligensi dan pendidikan mempengaruhi orientasi maupun partisipasi politik seseorang. Penelitian kali ini hendak memfokuskan diri pada variabel kreativitas—yang memuat jenis pemikiran yang cukup kontras dengan inteligensi—sebagai prediktor partisipasi politik. Terdapat sejumlah alasan berkenaan dengan hal ini. Definisi “kreativitas” yang secara umum disepakati berasal dari Amabile (1997), yakni produksi gagasan-gagasan baru (*novel ideas*) dalam dunia aktivitas manusia (ilmu, seni, pendidikan, bisnis, dan hidup sehari-hari) yang tepat (*relevant, appropriate*) terhadap masalah atau peluang yang hadir di hadapan kita. Sejumlah telaah kritis dan riset empiris memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan sifat antara inteligensi dengan kreativitas. Kreativitas dapat diestimasi oleh pemikiran divergen, walaupun kreativitas tidak identik dengan pemikiran divergen (Runco, 2008), sementara itu IQ (*intelligence quotient*) yang dihasilkan oleh tes-tes inteligensi dapat diestimasi oleh pemikiran konvergen (Mayer, 2004). Dalam berpikir konvergen, individu berupaya mengkonstruksi sebuah jawaban, mengetahui bahwa jawaban tersebut akan dievaluasi berdasarkan sebuah kriteria kebenaran; sedangkan dalam berpikir divergen, individu memberikan sebanyak-banyaknya solusi-solusi baru terhadap sebuah

masalah dan dievaluasi berdasarkan kuantitas dan originalitas jawaban (Mayer, 2004). Batey dan Furnham (2006) lebih lanjut menyatakan bahwa walaupun ada hubungan pada taraf sedang antara inteligensi dan kreativitas, keduanya tetap berbeda:

“The studies of the relation between creativity and intelligence indicate that the two constructs are modestly related. Correlations between the two are found in the range of $r = .20-.40$, suggesting that approximately 5–20% of the variance may be accounted for. Even with corrections for reliability, it is unlikely that these two traits will ever be thought of as synonymous, although they are clearly related. It appears that creativity as fluency is more strongly related to IQ than is creativity as originality High IQ is a necessary but insufficient trait for success in science and engineering, but it is less likely to be important for achievement in the arts.” (Batey & Furnham, 2006:381-382)

Menurut Phipps (2012) kreativitas berhubungan dengan intensi kewirausahaan (*entrepreneurial intentions*). Padahal, di sisi lain, aktivitas politik memerlukan “semangat kewirausahaan”, bahkan dewasa ini telah berkembang kajian teoretis yang disebut “*political entrepreneurship*” (lihat: Campbell & Mitchell, 2012; Holcombe, 2002; McCaffrey & Salerno, 2011; Sheingate, 2003). Sheingate (2003:185,187) mengelaborasi istilah “wirausaha politik”, sebagai berikut:

“Entrepreneurs are individuals whose creative acts have transformative effects on politics, policies, or institutions Although the term ‘political entrepreneur’ originates with Schumpeter, the entrepreneur in political science can be traced to Robert Dahl. In Who Governs, Dahl used the term ‘political entrepreneur’ to describe cunning and resourceful political leadership According to Dahl, entrepreneurial leadership was an instrument of political change Together, these works portray entrepreneurs as creative, resourceful, and opportunistic leaders whose skillful manipulation of politics somehow results in the creation of a new policy or a new bureaucratic agency, creates a new institution, or transforms an existing one.”

Berdasarkan hal-hal tersebut, peneliti menghipotesiskan (H4) bahwa “Semakin tinggi kreativitas seseorang, semakin banyak orang tersebut terlibat pengalaman yang perlu untuk berpolitik” (Gambar 1).

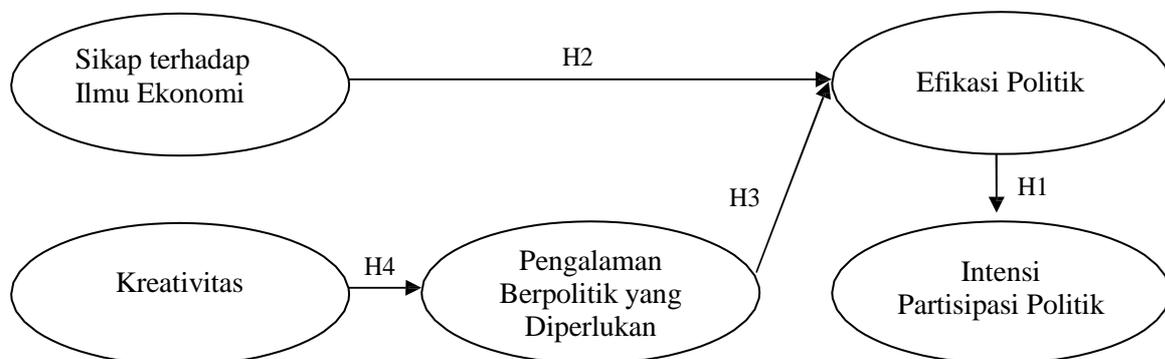
Dengan mengintegrasikan relasi-relasi antar variabel yang dihipotesiskan dalam H1 sampai dengan H4, peneliti menghipotesiskan (H5) bahwa terdapat sebuah model teoretis yang mampu menjelaskan variasi tinggi atau rendahnya intensi partisipasi politik mahasiswa, yakni mekanisme atau jalur psikologis sebagaimana nampak dalam Gambar 1.

2. Metode Penelitian

Desain, partisipan, dan variabel. Partisipan penelitian ini adalah 104 mahasiswa Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang (FPPsi UM), Jawa Timur ($M_{usia} = 19,50$ tahun; $SD_{usia} = 2,397$ tahun), yang terdiri atas 22 laki-laki dan 82 perempuan (catatan: komposisi jenis kelamin ini merupakan komposisi nyata di FPPsi UM dan kebanyakan Fakultas/Program Studi Psikologi di Indonesia yang didominasi oleh mahasiswa berjenis kelamin perempuan). Mayoritas (91%) beretnis Jawa. Sampel diambil dengan teknik *convenience/accidental sampling*.

Desain penelitian ini adalah desain korelasional prediktif. Variabel dependen adalah Intensitas Partisipasi Politik. Variabel prediktor adalah Kreativitas dan Sikap terhadap Ilmu Ekonomi. Variabel mediator adalah Pengalaman Berpolitik yang Diperlukan (*necessary political experience*) dan Efikasi Politik (*political efficacy*). Analisis data dilakukan dengan program bantu LISREL 8.8. Bagan hipotetik diajukan sebagaimana Gambar 1.

Data penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur merupakan suatu metode analisis untuk melihat hubungan antara tiga atau lebih variabel (Seniati, 2009). Kriteria untuk menentukan apakah model *fit* (kesesuaian antara model



Gambar 1. Bagan Hipotetik Penelitian

penelitian atau model pengukuran dengan data empiris) adalah (1) *Chi-square*: Model *fit* jika $P\text{-value} > 0,05$ (Seniati, 2009); (2) *Goodness of Fit Indices* (GFI): Model *fit* jika $GFI > 0,90$ (Seniati, 2009); (3) *Root mean square error of approximation* (RMSEA). Model *fit* jika $RMSEA < 0,10$ (Kenny, 2012).

Instrumen. Alat ukur intensi partisipasi politik diadaptasi dan dikembangkan dari *political participation scale* (Eckstein, Noack, & Gniewosz, 2012; Vecchione & Caprara, 2009). Instrumen ini terdiri atas 31 butir pernyataan. Contoh butirnya, sebagai berikut: (1) Saya mau berperan serta dalam dewan mahasiswa (BEM, Senat, dsb.), (2) Saya bersedia mendonasikan sebagian uang saya kepada organisasi politik, (3) Saya punya kemauan untuk berdemonstrasi melawan kebijakan atau peraturan yang tidak saya sukai, (4) Bila ada kesempatan, saya akan mencalonkan diri sebagai pengurus atau ketua BEM, (5) Saya bersedia mengedarkan petisi-petisi yang menuntut peningkatan kualitas kebijakan/peraturan pemerintah, (6) Saya bersedia mengedarkan petisi-petisi yang menuntut peningkatan kualitas kebijakan/peraturan pemerintah, (7) Saya memiliki kemauan untuk menulis di mading/koran/majalah tentang kritik terhadap pelayanan publik dari Pemda/Pemprov/Pemerintah Kota, (8) Saya menggunakan jejaring sosial (*Facebook*, *Twitter*, dll.) untuk mendukung terpilihnya seorang kandidat pemimpin, (9) Saya berpartisipasi dalam diskusi, *talkshow* politik, baik menghadiri langsung tempatnya, maupun melalui telepon ke radio, TV, atau forum internet, (10) Siapapun yang menjadi pemimpin di wilayah kota/kabupaten/provinsi saya, saya tidak peduli (*unfavorable item*), (11) Saya meneruskan (*forward*) email, *BlackBerry Messenger*, SMS, leaflet, dan sebagainya, kampanye politik ke orang lain, (12) Saya memasang nama dan/atau foto kandidat politik di *status/wall* jejaring sosial, (13) Saya mengomentari calon atau kandidat pemimpin di *status/wall* jejaring sosial, (14) Saya turut memperjuangkan hak-hak minoritas dengan berbagai cara, (15) Bila ada kesempatan, saya akan berusaha meminta pemimpin agama untuk turut membicarakan kondisi sosial politik, (16) Saya menggunakan produk (pakaian, barang, dsb.) atau jasa (kursus, dsb.) dengan mempertimbangkan latar belakang politiknya, dan (17) Saya berupaya menjalin komunikasi atau hubungan dengan tokoh politik. Hasil uji reliabilitas terhadap 58 mahasiswa FPPsi UM menunjukkan Cronbach's $\alpha = 0,905$ dengan menghapus 3 butir. Besarnya korelasi setiap butir dengan kriteria adalah minimum 0,318 dan maksimum 0,685.

Alat ukur Efikasi Politik diadaptasi dari *internal political efficacy scale* (EFFIC; Husfeldt, Barber, & Torney-Purta, 2005). Instrumen ini terdiri atas 4 pernyataan. Contoh butirnya sebagai berikut: (1) Ketika isu atau persoalan politik dibahas, biasanya saya memiliki pendapat untuk diungkapkan, (2) Saya mampu

dengan mudah memahami kebanyakan isu politik, dan (3) Saya tahu tentang politik lebih banyak daripada orang lain seusia saya. Hasil uji reliabilitas menunjukkan Cronbach's $\alpha = 0,777$ tanpa ada butir yang perlu dihapus. Besarnya korelasi setiap butir dengan kriteria adalah minimum 0,550 dan maksimum 0,665.

Alat ukur Pengalaman Berpolitik Yang Diperlukan (*necessary political experience*) diadaptasi dan dikembangkan dari *political skills scale* (Jarvis, Montoya, & Mulvoy, 2005). Instrumen ini memiliki 6 butir. Contoh butirnya sebagai berikut: (1) Saya pernah membuat keputusan dalam rapat/pertemuan, (2) Saya pernah menjadi penyelenggara atau ketua rapat/pertemuan, (3) Saya pernah memberikan pidato, (4) Saya memiliki pengalaman mengikuti kampanye, memilih, maupun dipilih sebagai pengurus OSIS atau organisasi lain selama SMP/SMA, dan (5) Saya memiliki pengalaman mengikuti kampanye, memilih, maupun dipilih sebagai pengurus unit kegiatan mahasiswa atau organisasi lain selama kuliah. Hasil uji reliabilitas menunjukkan Cronbach's $\alpha = 0,666$ dengan menghapus 1 butir. Besarnya korelasi setiap butir dengan kriteria adalah minimum 0,389 dan maksimum 0,529.

Alat ukur Sikap terhadap Ilmu Ekonomi diadaptasi dari *attitudes toward economics scale* (Agarwal & Day, 1998; Halim, Zaini, & Hilmi, 2009). Instrumen ini terdiri atas 14 pernyataan. Contoh butir sebagai berikut: (1) Saya menikmati membaca artikel-artikel bermuatan topik ekonomi, (2) Saya benci ilmu ekonomi (*unfavorable item*), (3) Mempelajari ilmu ekonomi membuang-buang waktu (*unfavorable item*), (4) Kadang-kadang saya membaca buku-buku atau tulisan ekonomi walaupun saya tidak ditugaskan membacanya, (5) Saya berminat untuk menghadiri kuliah yang disampaikan oleh ahli ekonomi (ekonom), (6) Saya menggunakan konsep-konsep ekonomi untuk menganalisis situasi, (7) Menurut saya, ilmu ekonomi itu praktis, (8) Gagasan-gagasan ilmu ekonomi adalah gagasan-gagasan yang bebal/bodoh (*unfavorable item*), dan (9) Ilmu ekonomi akan sangat berguna dalam karir profesional saya. Hasil uji reliabilitas menunjukkan Cronbach's $\alpha = 0,904$ tanpa ada butir yang perlu dihapus. Besarnya korelasi setiap butir dengan kriteria adalah minimum 0,430 dan maksimum 0,854.

Alat ukur Kreativitas diadaptasi dari *revised creativity domain questionnaire* (CDQ-R; Kaufman, Cole, & Baer, 2009). Alat ukur ini merupakan kuesioner laporan diri (*self-report*). Instrumen ini terdiri atas 28 butir. Skor yang semakin tinggi menunjukkan semakin banyak ranah kreativitas yang dimiliki oleh seseorang. Silvia, Wiger, Reiter-Palmon, dan Kaufman (2012) menyatakan bahwa pelaporan kreativitas diri merupakan salah satu cara yang valid untuk mengukur kreativitas di antara asesmen-asesmen kreativitas lain yang ada

(*creative product assessment, performance task assessment*, dan sebagainya), meskipun tendensi “*faking good*” tetap perlu diwaspadai. Menurut kajian mereka, kuesioner kreativitas yang bersifat *self-report* cukup valid digunakan untuk tujuan-tujuan yang bersifat *low-stakes* bukan *high-stakes*. Yang dimaksud tujuan *high-stakes* contohnya adalah untuk keperluan seleksi dan penempatan pekerja serta pengambilan keputusan dalam pendidikan. Penelitian kali ini merupakan penelitian yang bersifat *low-stakes*, sehingga kita boleh berharap bahwa tendensi *faking good* tidak tinggi. Butir-butir skala dipilih oleh peneliti dengan mempertimbangkan (1) ranah-ranah kreativitas yang berhubungan dengan pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berpolitik, serta (2) kuantitas butir dan waktu yang tersedia untuk pengisian oleh partisipan. Pernyataan pendahuluan alat ukur ini berbunyi: “*Saya kreatif dalam*” Contoh butirnya sebagai berikut: (1) Akuntansi/Manajemen Uang, (2) *Acting/Performance*, (3) *Fashion/Berpakaian*, (4) Hukum/Keterampilan Legal, (5) Manajemen Orang/Kepemimpinan, (6) Ilmu-ilmu Sosial (termasuk Psikologi, Antropologi, Sosiologi), (7) Menulis Fiksi Prosa, (8) Menulis Non-fiksi/Jurnalisme. Indeks Cronbach’s α dari skala ini adalah 0,874 dengan menghapus 7 butir. Besarnya korelasi setiap butir dengan kriteria adalah minimum 0,320 dan maksimum 0,621. Seluruh alat ukur di atas memiliki skala respons dari 1 (*Sangat Tidak Sesuai*) sampai dengan 6 (*Sangat Sesuai*).

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa seluruh hipotesis (H1 sampai dengan H5) didukung oleh data empiris ($T\text{-values} > 1,96$), dengan model jalur sebagaimana nampak pada Gambar 2 ($Chi\text{-Square} = 8,24$, $df = 5$, $P\text{-value} > 0,05$, $GFI > 0,90$, $RMSEA < 0,10$). Ukuran efek Sikap Terhadap Ilmu Ekonomi dan Pengalaman yang Perlu untuk Berpolitik terhadap Efikasi Politik, berdasarkan koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh dari persamaan struktural, adalah 14%; sedangkan sumbangsih efikasi politik terhadap intensi partisipasi politik adalah 18% (lihat **Apendiks**).

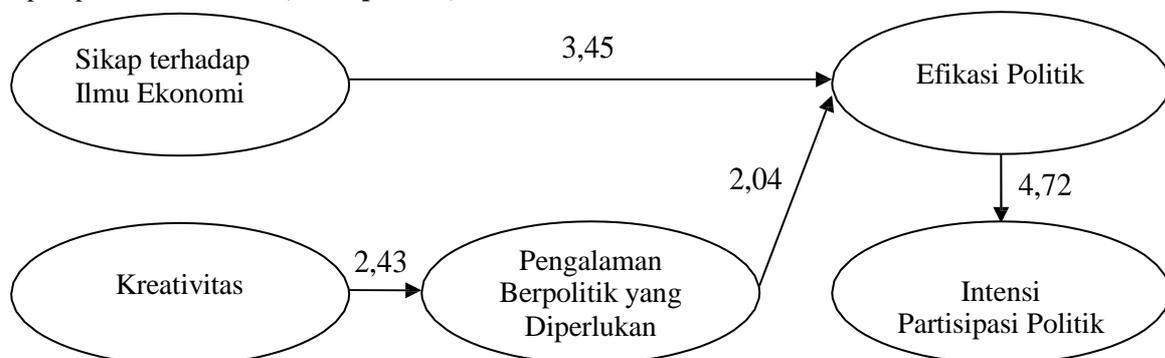
Sesuai dengan model jalur pada Gambar 2, penelitian ini menemukan bahwa (1) Sikap terhadap ilmu ekonomi mampu memprediksikan intensi partisipasi politik secara tidak langsung, yakni melalui mediasi efikasi politik, (2) Kreativitas mampu memprediksikan intensi partisipasi politik secara tidak langsung, yakni melalui mediasi pengalaman yang perlu untuk berpolitik dan efikasi politik. Temuan ini mendukung hipotesis integratif (H5) dan memberikan pemahaman baru mengenai mekanisme psikologis intensi partisipasi politik pada mahasiswa.

Sebelum membahas taraf psikologisnya, hubungan antara ilmu ekonomi dengan kegiatan politik secara objektif nampak dalam berita berikut (“Ironi negara”, 2013):

“Pesaing Obama dalam pemilu presiden AS 2012, Mitt Romney, mengkritik kebijakan ekonomi AS di bawah Obama. Obama menyerang balik bahwa ia mendapatkan warisan ekonomi buruk sebagai buah dari kinerja buruk Bush, yang banyak ditinggalkan para penasihat ekonomi.”

Gagasan bahwa ekonomi berkaitan dengan politik kini bukan lagi merupakan fakta pada tingkat makro sebagaimana ditunjukkan di atas. Karena penelitian kali ini menunjukkan bahwa pada taraf mikro-individual-psikis pun, keyakinan atau efikasi berpolitik turut dikontribusikan oleh bagaimana mahasiswa bersikap terhadap ilmu ekonomi. Apabila sikapnya terhadap ilmu ekonomi semakin positif, maka efikasi berpoliticnya semakin tinggi. Temuan ini mengimplikasikan bahwa agar dapat unggul berpolitik, mahasiswa perlu juga bersikap positif terhadap ilmu ekonomi.

Prediksi efikasi politik terhadap intensi partisipasi politik (H1). Seperti disebutkan dalam bagian Pendahuluan, efikasi politik merupakan prediktor klasik terhadap intensi partisipasi politik (Gallego & Oberski, 2012). Karp dan Banducci (2008) menegaskan bahwa kurangnya efikasi politik (*less efficacious*) akan



Chi-Square = 8.24, df = 5, P-value = 0.14349, GFI = 0.97, RMSEA = 0.08, n = 104

Gambar 2. Hasil Analisis Data ($T\text{-values}$ Ditampilkan pada Panah)

menurunkan probabilitas partisipasi politik. Ciri khas efikasi politik adalah persepsi internal seseorang bahwa ia mampu mengerti politik, kompeten dalam melakukan tindakan politik, terampil dalam mempengaruhi sistem politik, dan bahwa suara atau tindakannya penting atau desisif dalam menentukan kebijakan publik (Hoffman & Thomson, 2009; Karp & Banducci, 2008). Hal ini berarti bahwa seseorang tidak menggantungkan keyakinan politiknya pada lembaga-lembaga politik, dan juga tidak banyak berharap pada responsivitas, kompetensi, dan kinerja para pemimpin politik; walau sejumlah peneliti membahasakan kondisi-kondisi yang disebutkan terakhir ini sebagai “*external political efficacy*”. Yang diukur dalam penelitian ini adalah efikasi politik internal. Becker *et al.* (2009) serta Hoffman dan Thomson (2009) mengkonfirmasi bahwa efikasi politik menghasilkan intensi partisipasi politik dan bukan sebaliknya. Seluruh penjelasan ini sejalan dengan temuan yang mendukung hipotesis pertama.

Prediksi sikap terhadap ilmu ekonomi terhadap efikasi politik (H2). Moffat (2013) mengemukakan sejumlah alasan mengapa orang perlu mempelajari (wujud sikap positif terhadap) ilmu ekonomi. Salah satu alasan terpenting adalah bahwa “*Economists understand unintended consequences*” (para ekonom memahami konsekuensi-konsekuensi yang tidak diniatkan). Hal ini karena banyak dari problem ekonomi memiliki “efek sekunder”. Sebagai contoh, Moffat (2013) memaparkan: Pemerintah menarik pajak untuk menjamin sejumlah program sosial, namun efek sekundernya, hal ini dapat mengubah perilaku orang yang bahkan dapat menyebabkan pelambatan pertumbuhan ekonomi. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, orang sebenarnya belajar keterampilan pengambilan keputusan sambil bersiap menghadapi dan mengelola kemungkinan-kemungkinan hadirnya efek sekunder dan konsekuensi yang tidak diniatkan. Dinamika ini memiliki titik temu dengan dinamika dalam dunia politik, yakni sebagai berikut: Dengan partisipasi politiknya, sesungguhnya orang berpartisipasi dalam kebijakan publik (*public policy*)—sesuai dengan definisi “politik” yang dikemukakan pada bagian awal artikel ini. Padahal kebijakan publik hampir selalu—untuk tidak mengatakan: semuanya—memiliki *unintended consequences*, yakni konsekuensi-konsekuensi yang secara paradoksikal bertentangan dengan maksud awal dari pembuatan kebijakan (Kovandzic, Sloan, & Vieraitis, 2002; Roots, 2004; Friedson, 2012). Dengan perkataan lain, ketidakpastian (*uncertainty*) merupakan fitur khas yang dipelajari dalam ilmu ekonomi maupun yang terdapat dalam aktivitas (termasuk keputusan-keputusan) politik. Sedemikian pentingnya fitur ini dalam dunia politik, sebuah buku yang berjudul *Uncertainty in American Politics* yang disunting oleh seorang guru besar Universitas Harvard (Burden, 2003) secara khusus menguraikan hakikat, aspek-aspek, jenis-jenis, serta dampak ketidakpastian

dalam politik terhadap institusi-institusi politik, pemilihan umum, dan warga. Sampai dengan buku tersebut terbit, konsep “ketidakpastian” diklaim belum banyak didayagunakan (*underutilized*) dalam studi-studi ilmu politik (Heineman, 2004; McGarrity, 2004). Temuan penelitian kali ini memberikan sudut pandang alternatif bahwa penghayatan akan dan pelatihan dalam menggeluti *unintended consequence* ataupun *uncertainty* dalam dunia politik dapat didekati melalui pembelajaran ilmu ekonomi.

Penjelasan *kedua* mengapa sikap positif terhadap ilmu ekonomi dapat mempertinggi efikasi politik adalah karena hal-hal yang didiskusikan dalam bidang ilmu ekonomi pada dasarnya bersifat politis. Artinya, pemahaman terhadap terminologi serta cara berpikir dalam ilmu ekonomi juga merupakan instrumen yang bermakna dalam berpolitik. Sebagai contoh, Stanford menegaskan:

“... *debates over economic issues are not technical debates, where expertise alone settles the day. They are deeply political debates, in the broad sense of that word: distinct groups of people have distinct interests, they know their interests, and they naturally work to promote them. This occurs everywhere in the economy – and economics shouldn’t pretend that it doesn’t.*” (Stanford, 2008:3)

Penjelasan *ketiga* yang dapat menerangkan korelasi positif antara sikap terhadap ilmu ekonomi dan efikasi politik adalah karena mereka yang tertarik dan (mencoba) mempelajari ilmu ekonomi memperoleh keterampilan analitis-kuantitatif-matematis yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan mereka (Black, Sanders, & Taylor, 2003), sementara keterampilan matematis memiliki kontribusi dalam aktivitas berpolitik (Sánchez & Blomhøj, 2010; Taylor & Pacelli, 2008). Matematika yang dimaksud dalam hal ini khususnya adalah yang bernuansa matematika kritis (*critical mathematics*), yang berfokus pada peran dan fungsi matematika dalam masyarakat, yang berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat demokratis. Contoh konkret dari matematika semacam ini adalah diciptakannya “indeks peminggiran/keterpinggiran” (*marginalization index*) di Meksiko. Indeks ini merupakan ukuran tingkat sejauh mana sebuah kota membutuhkan sumberdaya untuk meningkatkan pembangunan sosialnya (Sánchez & Blomhøj, 2010). Ukuran ini berbasis pada model matematis yang di dalamnya mengukur sembilan indikator sosioekonomi. Indeks marjinalisasi merupakan diskursus (wacana) matematika namun sekaligus juga merupakan diskursus politik. Contoh lain dapat disimak pada video berjudul “Pemerintah dan Matematika” (<http://youtu.be/I1s2exbD5T0?>). Contoh-contoh tersebut menunjukkan bagaimana matematika — yang dipelajari dalam ilmu ekonomi — dapat digunakan untuk menginspirasi, melegitimasi dan menjustifikasi keputusan-keputusan politik. Sebagai tambahan, dalam buku *Mathematics*

and Politics, Taylor dan Pacelli (2008) khusus mengulas aplikasi matematika pada enam topik berikut ini: *social choice*, *yes-no voting*, kekuasaan politik, konflik, keadilan (*fairness*), dan *escalation*.

Penjelasan *keempat*, Chrystal dan Peel (2001) menegaskan bahwa meskipun pendekatan atau metode ilmu politik dan ilmu ekonomi berbeda [dan karenanya dalam model penelitian ini diperlakukan sebagai dua variabel yang berbeda antara “sikap terhadap ilmu ekonomi” dan “efikasi politik”, “partisipasi politik”], namun: “... *Economists’ way of thinking can be a fruitful source of testable hypotheses for political science*” (Chrystal & Peel, 2001:62). Dalam tulisannya Chrystal dan Peel memang menyajikan contoh-contoh yang mendukung pernyataan tersebut.

Seluruh penjelasan di atas memperlihatkan mengapa sikap terhadap ilmu ekonomi memiliki korelasi linear searah dengan efikasi politik. Hal yang menarik adalah bahwa baik dari dimensi rasionalitas (model matematis-prediktif) maupun dari dimensi ketidakpastian (*uncertainty, unintended consequence*) dari ilmu ekonomi, keduanya sama-sama menunjukkan kontribusi dalam menjelaskan efikasi dan partisipasi politik seseorang.

Prediksi kreativitas terhadap pengalaman berpolitik yang diperlukan (H4), serta prediksi pengalaman berpolitik terhadap efikasi politik (H3). Temuan utama berikutnya dari penelitian kali ini adalah bahwa kreativitas mampu meramalkan intensi partisipasi politik melalui pengalaman berpolitik yang diperlukan (*necessary political experience*) dan selanjutnya mempengaruhi efikasi politik. Ada beberapa penjelasan yang dapat dikemukakan.

Kreativitas menunjang pembelajaran organisasional (*organizational learning*), di mana pembelajaran ini selanjutnya berperan dalam mengelola keragaman kepentingan dan tuntutan yang muncul dari aktor-aktor organisasi yang melibatkan konstituen politik (Cheng, 2005). Organisasi yang dimaksud pada tingkat politik praktis adalah organisasi di mana terdapat aktivitas politik, seperti partai politik. Kreativitas dalam organisasi politik diperlukan untuk manajemen konflik, kompetisi, negosiasi, dan pertarungan merebut kekuasaan dalam situasi demokratis. Masih menurut Cheng (2005), di samping proses-proses organisasional politik membutuhkan individu-individu kreatif, proses-proses tersebut juga memungkinkan dihasilkannya kreativitas-kreativitas baru, baik dalam pemikiran, pengetahuan, maupun tindakan inovatif. Hal ini akan membuat organisasi atau partai politik tetap memiliki daya tarik bagi para aktor di dalamnya maupun bagi publik pemilihnya. Senada dengan pemikiran tersebut, Adian (2013) menulis:

“Pertarungan antara Gerindra dan Hanura sejatinya adalah pertarungan antara Prabowo dan Wiranto. Bukan pertarungan antar-organisasi. Hidup-mati partai pun terpulang pada elektabilitas calon presidennya ... Politik baru menarik jika pertarungan terjadi di antara kader-kader terbaik dengan selisih elektabilitas yang tipis. Saya bermimpi setiap partai kelak membuat konvensi untuk mendapatkan kader terbaik dari kader-kader terbaiknya. Kader terbaik itulah yang akan bertarung melawan kader terbaik partai lain. Saya merindukan satu saat nanti diskusi politik di republik ini tidak melulu bicara soal tokoh sebab saat itu kita sudah melupakan Jokowi.”

Pernyataan Adian pada hakikatnya menunjukkan adanya kemandegan dalam *organizational learning* pada partai-partai politik di Indonesia yang menggantungkan nasib pada tokoh politik. Temuan penelitian kali ini jelas menunjukkan bahwa efikasi politik dapat lahir dari kreativitas melalui jalur pengalaman berpolitik yang diperlukan (*necessary political experience*), yang dalam penelitian Cheng (2005) berhubungan dengan *organizational learning*. Dengan demikian, kemandegan tersebut seharusnya tidak terjadi apabila organisasi politik mengapresiasi secara kuat kreativitas orang-orang yang sedang maupun akan melibatkan diri dalam organisasinya dalam rangka partisipasi politik.

Penjelasan *kedua* mengapa kreativitas mampu meramalkan partisipasi politik melalui jalur pengalaman berpolitik dan efikasi politik adalah karena, sebagaimana diungkapkan di atas, politik memuat ketidakpastian (*uncertainty*). Sementara itu, ketidakpastian mengimplikasikan dibutuhkan kreativitas, sebagaimana pernyataan Wallerstein (1998:321-322), “... *the universe manifests the evolutionary development of complexity and that the overwhelming majority of situations cannot be explained by assumptions of linear equilibria and time-reversibility ... If everything is uncertain, then the future is open to creativity.*” Sejalan dengan Wallerstein, 15 tahun kemudian Connolly (2013) menyajikan bukti-bukti adanya paralelisme (kesejajaran, kesamaan pengalaman) antara ketidakpastian dan elemen kreativitas dalam evolusi biologis manusia dengan ketidakpastian dan kreativitas dalam peristiwa-peristiwa politik maupun kultural. Tegasnya, ia menyatakan:

“A growing group of complexity scientists in the domains of neuroscience and evolutionary biology contend that there are variable degrees of real creativity in organic processes inside and outside the human estate” (Connolly, 2013:509).

Hal ini bermakna bahwa kreativitas dalam diri manusia secara programatik memiliki kompatibilitas dengan aktivitas politik. Apabila manusia mengenal sejarah dirinya yang mengalami evolusi secara kreatif, maka implikasinya ia juga mengerti bahwa berpolitik

merupakan aktivitas *favorable* yang seturut dengan hakikat dirinya.

Penjelasan *ketiga* sehubungan dengan korelasi positif antara kreativitas dengan pengalaman, efikasi, dan intensi partisipasi politik adalah oleh karena pengalaman berpolitik membutuhkan kreativitas. Sebagai contoh, Müller (2005) secara khusus membahas peran persuasif dari metafora-metafora yang kreatif dalam pidato-pidato politik, yang selanjutnya mempengaruhi diskursus politik. Di atas juga telah dikemukakan tentang spirit kreativitas dalam *entrepreneurship* sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan politik (Campbell & Mitchell, 2012; Holcombe, 2002; McCaffrey & Salerno, 2011; Sheingate, 2003). Contoh lain, Mooers (2007) membahas *political imagination* yang menekankan unsur kreatif dalam sukses berpolitik dalam arti sukses mengubah dunia, menuju masyarakat yang baik (*good society*)—yang menjadi tujuan politik. Titik pijak argumennya menarik, yakni sebagai berikut:

“Plato never lived in his Republic; Hobbes never wandered through the state of nature; and Marx never knew the rule of the ‘associated producers’. But, all of them may have felt that they had glimpsed elements of these alternate futures in their own time” (Mooers, 2007:261).

Senada dengan Mooers (2007), menurut Holman (2012), politik memuat lebih daripada sekadar rasionalitas pasif, dan politik bukan merupakan *“neutral procedural mechanisms”*. Politik bukan sekadar persoalan bagaimana memperoleh representasi deskriptif atas kepentingan yang dimiliki dalam kehidupan bersama, melainkan, lebih dari itu, merupakan persoalan bagaimana mengekspresikan diri secara kritis dan aktif, dan hal ini membutuhkan kreativitas. Sedemikian pentingnya kreativitas dalam politik, Kubicek (2004) melalui disertasinya secara khusus menciptakan sebuah alat analitis yang dapat menemukan lokus-lokus kreativitas dalam sejarah kehidupan politik.

Berbagai penjelasan di atas memberikan penerangan mengapa sikap kreativitas memiliki korelasi linear searah dengan pengalaman yang perlu untuk berpolitik; dan selanjutnya pengalaman ini berkorelasi dengan efikasi dan seterusnya intensi partisipasi politik.

4. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kreativitas dan sikap terhadap ilmu ekonomi mampu meramalkan intensi partisipasi politik mahasiswa melalui mediasi efikasi politik dan pengalaman berpolitik yang diperlukan.

Penelitian berikutnya perlu menyeimbangkan jumlah partisipan laki-laki dan perempuan. Partisipan yang diambil secara aksidental dan diambil di Program Studi Psikologi memungkinkan ketidakseimbangan jumlah

jenis kelamin, yang dalam penelitian ini didominasi oleh perempuan. Oleh karenanya, generalisasi hasil penelitian ini mungkin terbatas.

Penelitian berikutnya juga dapat memperluas model penelitian ini dengan menyelidiki variabel-variabel lain yang berkontribusi terhadap kreativitas dan sikap terhadap ilmu ekonomi, khususnya yang menyangkut gaya dan tujuan hidup pribadi maupun gaya dan tujuan hidup komunitas di mana pemuda hidup (bandingkan, misalnya, Twenge, Campbell, & Freeman, 2012). Twenge *et al.* menemukan bahwa kelompok generasi *“Millennials”* (orang-orang yang lahir setelah tahun 1982) memperlihatkan orientasi sipil (misalnya: minat terhadap masalah sosial dan politik, kepercayaan kepada pemerintah, serta aksi hemat energi dan menyelamatkan lingkungan) yang menurun, karena mereka menilai tujuan yang berkaitan dengan nilai ekstrinsik (uang, citra, dan popularitas) lebih penting daripada tujuan yang berkaitan dengan nilai intrinsik (penerimaan diri, afiliasi, dan komunitas). Peneliti memandang urgen pengintegrasian variabel-variabel tersebut ke dalam model penelitian yang dibangun kali ini, misalnya sebagai variabel-variabel moderator, karena mayoritas variabel yang dikemukakan Twenge *et al.* berkaitan dengan kuat atau lemahnya gagasan kepublikan yang menyediakan konteks yang penting bagi partisipasi politik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan lain, yakni tidak seimbang panjang antar skala. Lebih khusus, alat ukur Intensi Partisipasi Politik memiliki jumlah butir hingga 31 (sebelum uji coba) dan 28 (setelah uji coba instrumen); merupakan yang terbanyak jumlah butirnya di antara alat ukur lainnya. Hal ini membuka peluang menyusupnya ancaman tumpang tindih isi (*overlapping*) antar butir, serta biasanya reliabilitas konsistensi internal karena rentan terhadap jumlah butir. Peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan analisis faktor konfirmatori untuk lebih rinci menelusuri apakah terdapat tumpang tindih dimaksud (apakah ada butir yang tidak perlu dipertahankan), dan apakah pada kenyataannya terdapat pengelompokan butir menjadi beberapa sub-dimensi. Untuk alat ukur Pengalaman Berpolitik yang Diperlukan dengan indeks konsistensi internal yang marjinal, peneliti berikutnya perlu lebih jeli melakukan diferensiasi butir, mengidentifikasi sekiranya ada butir-butir yang tidak sepadan melainkan berjenjang (misalnya, memimpin rapat *vs.* menjadi Pengurus OSIS, dan sejenisnya). Pemerikayaan jumlah butir serta analisis kluster butir secara hierarkis dapat menjadi alternatif metodologis dalam hal ini.

Secara praktis, berdasarkan bukti adanya korelasi prediktif antara sikap dan literasi/pengetahuan (misalnya, Batterham, Calear, & Christensen, 2013), temuan penelitian ini mengimplikasikan bahwa mata pelajaran ilmu ekonomi sejak sekolah menengah perlu kuat didukung dengan kurikulum yang menekankan

aspek sosial dari ilmu ekonomi dan matematika. Dengan demikian, ilmu tersebut tidak seperti berada di “ruang vakum” yang terisolasi dari konteks sosialnya. Di samping itu, proses pembelajaran perlu memberikan *insight* kepada peserta didik mengenai betapa dapat sangat terkaitnya logika berpikir serta tindakan ekonomis dan matematis mereka kelak dengan proses-proses politik, yang mempengaruhi kehidupan orang banyak di sekitar mereka. Apabila kesadaran itu berhasil ditumbuhkan melalui proses yang menarik dan yang tidak menekankan kerumitan matematikanya, maka kita boleh berharap hal ini memberikan sumbangsih pada menurunnya berbagai rupa apatisisme politik. Dengan perkataan lain, pembelajaran ilmu ekonomi dan matematika merupakan dua ajang alternatif yang berharga untuk “pendidikan politik”, mengingat tidak ada mata pelajaran Ilmu Politik di sekolah dasar dan menengah. Hal ini juga mengingatkan bahwa mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sebagai mata kuliah yang sebenarnya paling dekat dengan materi partisipasi politik warga, masih bersifat “bias kekuasaan, menonjolkan tafsir rezim yang berkuasa, tidak menarik, dan formalistik” (Wisudo dalam Akuntono, 2012). Melalui mata pelajaran ilmu ekonomi, siswa dapat sejak dini mempelajari bahwa ada pengaruh politik (“pengaruh bagi orang banyak”) dari keputusan-keputusan ekonomis mereka, dan bahwa melalui pengaruh itu, impian mereka tentang perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik dapat diwujudkan. Di samping itu, melalui aktivitas menulis esai kreatif di berbagai mata pelajaran, dan juga mata pelajaran kesenian dengan berbagai produk kreatifnya, siswa dapat belajar untuk semakin efektif menggunakannya sebagai media ekspresi aspirasinya yang berkenaan dengan kehidupan bersama. Intinya, kreativitas perlu digalakkan di segala lini pendidikan.

Daftar Acuan

- Adian, D.G. (2013, September 9). Lupakan Jokowi. *Kompas*. Ditemukembali dari <http://nasional.kompas.com/read/2013/09/09/0857340/Lupakan.Jokowi>
- Agarwal, R., & Day, A.E. (1998). The impact of the internet on economic education. *Journal of Economic Education*, 29(2), 99-110.
- Akuntono, I. (2012). Pendidikan Pancasila makin termarginalkan. *Kompas.com*. Ditemukembali dari <http://edukasi.kompas.com/read/2012/05/31/1533087/Pendidikan.Pancasila.Makin.Termarginalkan>
- Apatisme meluas, sinyal bagi demokrasi. (2013, September 6). *Kompas*, h. 1, 15.
- BA Economics and Politics. (2013). *Leeds.ac.uk*. Diakses dari <http://www.polis.leeds.ac.uk/undergraduates/ba-politics-economics/>.
- Batey, M., & Furnham, A. (2006). Creativity, intelligence, and personality: A critical review of the scattered literature. *Genetic, Social, and General Psychology Monographs*, 132(4), 355-429.
- Batterham, P.J., Calear, A.L., & Christensen, H. (2013). Correlates of suicide stigma and suicide literacy in the community. *Suicide and Life-Threatening Behavior*, 43(4), 406-417.
- Becker, R., Amundson, N., Anderson, D., Wenzel, K., Yakubova, M., Sajaia, N., & Franea, R. (2009). political participation, efficacy and the 2008 Minnesota Presidential Caucuses. *Qualitative Research Reports in Communication*, 10(1), 38-45.
- Berindra, M.S. (2013). Politik, tak cukup hanya belajar dari teori. *Kompas.com*. Diakses dari <http://edukasi.kompas.com/read/2013/01/23/09365083/twitter.com>.
- Black, D.A., Sanders, S., & Taylor, L. (2003). The economic reward for studying economics. *Economic Inquiry*, 41(3), 365-377.
- Brown, S.G. (1996). Incorporating political socialization theory into baccalaureate nursing education. *Nursing Outlook*, 44, 120-123.
- Brussino, S., Medrano, L., Sorribas, P., & Rabbia, H.H. (2011). Young adults' knowledge of politics: Evaluating the role of socio-cognitive variables using structural equations. *The Spanish Journal of Psychology*, 14(1), 183-194.
- Burden, B.C. (2009). The dynamic effects of education on voter turnout. *Electoral Studies*, 28, 540-549.
- Burden, B.C. (Ed.). (2003). *Uncertainty in American politics*. Cambridge & New York: Cambridge University Press.
- Campbell, N., & Mitchell, D.T. (2012). A (partial) review of entrepreneurship literature across disciplines. *Journal of Entrepreneurship and Public Policy*, 1(2), 183-199.
- Cheng, Y.C. (2005). Development of multiple thinking and creativity in organizational learning. *The International Journal of Educational Management*, 19(6/7), 605-622.
- Chrystal, K.A., & Peel, D.A. (2001). What can economics learn from political science, and vice versa? *Politics and Economic Policies*, 76(2), 62-65.
- Cicognani, E., Zani, B., Fournier, B., Gavray, C., & Born, M. (2012). Gender differences in youths' political engagement and participation: The role of parents and

- of adolescents' social and civic participation. *Journal of Adolescence*, 35, 561–576.
- Cole, E.R., & Stewart, A.J. (1996). Meanings of political participation among Black and White women: Political identity and social responsibility. *Journal of Personality and Social Psychology*, 71(1), 130-140.
- Connolly, W.E. (2013). Biology, politics, creativity. *Perspectives on Politics*, 11(2), 508-511.
- Eckstein, K., Noack, P., & Gniewosz, B. (2012). Attitudes toward political engagement and willingness to participate in politics: Trajectories throughout adolescence. *Journal of Adolescence*, 35, 485–495.
- Edgley, A., Stickley, T., Wright, N., & Repper, J. (2012). The politics of recovery in mental health: A left libertarian policy analysis. *Social Theory & Health*, 10(2), 121–140.
- Esser, F., & de Vreese, C. H. (2007). Comparing young voters' political engagement in the United States and Europe. *American Behavioral Scientist*, 50(9), 1195-1213.
- Friedson, A.I. (2012). *Three essays on unintended consequences of public policy*. Unpublished dissertation, Graduate School of Syracuse University.
- Gallego, A., & Oberski, D. (2012). Personality and political participation: The mediation hypothesis. *Political Behavior*, 34(3), 425-451.
- Halim, R.A., Zaini, A.A., Hilmi, Z.A.G. (2009). Identifying dimensions of attitudes towards economics education using exploratory factor analysis. *Technical Report. Institute of Research, Development and Commercialization, Universiti Teknologi MARA*. Diakses dari <http://eprints.uitm.edu.my/6783/>.
- Harkins, S.G., & Latane, B. (1998). Population and political participation: A social impact analysis of voter responsibility. *Group Dynamics: Theory, Research, and Practice*, 2(3), 192-207.
- Heineman, R. (2004). Book reviews: Uncertainty in American politics. *Perspectives on Political Science*, 33(1), 45-46.
- Hoffman, L.H., & Thomson, T.L. (2009). The effect of television viewing on adolescents' civic participation: Political efficacy as a mediating mechanism. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 53(1), 3-21.
- Holcombe, R.G. (2002). Political entrepreneurship and the democratic allocation of economic resources. *The Review of Austrian Economics*, 15(2/3), 143-159.
- Holman, C. (2012). Imagination and political creativity: Castoriadis and citizens' democracy. *Proceeding of 2012 Canadian Political Science Association (CPSA) Presentation*. Ditemukembali dari <http://www.cpsa-acsp.ca/papers-2012/Holman.pdf>
- Hopkins, D.J., & Williamson, T. (2012). Inactive by design? Neighborhood design and political participation. *Political Behavior*, 34, 79-101.
- Husfeldt, V., Barber, C., & Torney-Purta, J. (2005). Adolescents' social attitudes and expected political participation: New scales in the enhanced database of the IEA civic education study. *Working Paper from CEDARS—Civic Education Data and Researcher Services Department of Human Development, University of Maryland, College Park*. Diakses dari <http://terpconnect.umd.edu/~jtpurta/Original%20Documents/CEDARS%20new%20scales%20report.pdf>.
- Ironi negara peraih hadiah nobel ekonomi. (2013, September 15). *Kompas*. Ditemukembali dari <http://internasional.kompas.com/read/2013/09/15/1029036/Ironi.Negara.Peraih.Hadiah.Nobel.Ekonomi>
- Jarvis, S. E., Montoya, L., & Mulvoy, E. (2005). The political participation of college students, working students and working youth. *The Center for Information & Research on Civic Learning & Engagement, CIRCLE Working Paper 37*. Diakses dari <http://www.civicyouth.org/PopUps/WorkingPapers/WP37Jarvis.pdf>.
- Karp, J.A. & Banducci, S.A. (2008). Political efficacy and participation in twenty-seven democracies: How electoral systems shape political behaviour. *British Journal of Political Science*, 38(2), 311-334.
- Kaufman, J.C., Cole, J.C., & Baer, J. (2009). The construct of creativity: A structural model for self-reported creativity ratings. *Journal of Creative Behavior*, 43, 119–134.
- Kenny, D.A. (2012). Measuring model fit. Ditemukembali dari <http://davidakenny.net/cm/fit.htm>.
- Klesner, J.L. (2007). Social capital and political participation in Latin America: Evidence from Argentina, Chile, Mexico, and Peru. *Latin American Research Review*, 42(2), 1-32.
- Kovandzic, T.V., Sloan, J. J.-III, Vieraitis, L.M. (2002). Unintended consequences of politically popular sentencing policy: The homicide promoting effects of "three strikes" in U.S. cities (1980-1999). *Criminology & Public Policy*, 1(3), 399-424.
- Kubicek, B.V. (2004). *Political creativity*. Unpublished dissertation, Massachusetts Institute of Technology.

- Ditemukembali dari <http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/28499/57306430.pdf?sequence=1>.
- Li, Y., & Marsh, D. (2008). New forms of political participation: Searching for expert citizens and everyday makers. *British Journal of Political Science*, 38, 247-272.
- Magnis-Suseno, F. (1994). *Etika politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mayer, J.D. (2004). A classification system for the data of personality psychology and adjoining fields. *Review of General Psychology*, 8(3), 208-219.
- McCaffrey, M., & Salerno, J.T. (2011). A theory of political entrepreneurship. *Modern Economy*, 2, 552-560.
- McGarrity, J.P. (2004). Book reviews: Uncertainty in American politics. *Public Choice*, 120, 1-2.
- Moffat, M. (2013). Why study economics? *About.com*. Diakses dari http://economics.about.com/cs/studentresources/a/why_economics.htm.
- Mooers, C. (2007). Reviews - Collective dreams: Political imagination and community. *Canadian Journal of Political Science*, 40(1), 261-262.
- Müller, J. (1992). Kaum religius sebaiknya cuci tangan terhadap politik? Dalam Eduard Dopo (Ed.), *Keprihatianan sosial Gereja*. Yogyakarta: Kanisius.
- Müller, R. (2005). Creative metaphors in political discourse: Theoretical considerations on the basis of Swiss speeches. *Metaphorik*, 9, 53-73. Ditemukembali dari http://www.metaphorik.de/sites/www.metaphorik.de/files/journal-pdf/09_2005_mueller.pdf.
- Myers, N.D., Feltz, D.L., & Short, S.E. (2004). Collective efficacy and team performance: A longitudinal study of collegiate football teams. *Group Dynamics: Theory, Research, and Practice*, 8(2), 126-138.
- Perrewé, P.L., Zellars, K.L., Rossi, A.M., Ferris, G.R., Kacmar, C.J., Liu, Y., Zinko, R., & Hochwarter, W.A. (2005). Political skill: An antidote in the role overload-strain relationship. *Journal of Occupational Health Psychology*, 10(3), 239-250.
- Phipps, B.J., & Clark, J.E. (1993). Attitudes toward economics: Uni- or multidimensional? *Journal of Economic Education*, 24, 195-212.
- Phipps, S.T.A. (2012). Contributors to an enterprising gender: Examining the influence of creativity on entrepreneurial intentions and the moderating role of political skill controlling for gender. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 18(1), 77-90.
- Pinkleton, B.E., Austin, E.W., Zhou, Y., Willoughby, J.F., & Reiser, M. (2012). Perceptions of news media, external efficacy, and public affairs apathy in political decision making and disaffection. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 89(1), 23-39.
- Rindermann, H., Flores-Mendoza, C., & Woodley, M.A. (2011). Political orientations, intelligence and education. *Intelligence*, 40(2), 217-225.
- Roncaglia, A. (2003). On the relationship between economic and political discourses: A few examples. *Istituzioni e Sviluppo Economico*, 1(1), 141-156.
- Roots, R.I. (2004). When laws backfire: Unintended consequences of public policy. *The American Behavioral Scientist*, 47(11), 1376-1394.
- Runco, A. (2008). Commentary: Divergent thinking is not synonymous with creativity. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, 2(2), 93-96.
- Sánchez, M., & Blomhøj, M. (2010). The role of mathematics in politics as an issue for mathematics teaching. *Philosophy of Mathematics Education Journal*, 25.
- Sarfraz, A., Ahmed, S., Khalid, A., & Ajmal, M.A. (2012). Reasons for political interest and apathy among university students: A qualitative study. *Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology*, 9(2), 61-67.
- Schoon, I., Cheng, H., Gale, C.R., Batty, G.D., & Deary, I.J. (2010). Social status, cognitive ability, and educational attainment as predictors of liberal social attitudes and political trust. *Intelligence*, 38, 144-150.
- Seniati, L. (2009). Path analysis dan structural equation model. *Universitas Indonesia*. Ditemukembali dari <http://staff.ui.ac.id/internal/131998622/material/PATHANALYSIS.pdf>
- Sheingate, A.D. (2003). Political entrepreneurship, institutional change, and American political development. *Studies in American Political Development*, 17, 185-203.
- Silvia, P.J., Wigert, B., Reiter-Palmon, R., & Kaufman, J.C. (2012). Assessing creativity with self-report scales: A review and empirical evaluation. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, 6(1), 19-34.
- Stanford, J. (2008). *Economics for everyone: A short guide to the economics of capitalism*. New York: Pluto Press.
- Pasang Iklan Gratis. (2017). *Jual Beli Online Dan Pasang Iklan Gratis - Jualobral.net*. [online] Available at: <http://jualobral.net> [Accessed 27 Jul. 2017].

Swank, E.E. (2012). Predictors of political activism among social work students. *Journal of Social Work Education, 48*(2), 245-266.

Swanson, J. (2007). The economy and its relation to politics: Robert Dahls, neoclassical economics, and democracy. *Polity, 39*(2), 208-233.

Taylor, A.D., & Pacelli, A.M. (2008). *Mathematics and politics: Strategy, voting, power and proof* (2nd ed.). New York: Springer.

Twenge, J.M., Campbell, W.K., & Freeman, E.C. (2012). Generational differences in young adults' life goals, concern for others, and civic orientation, 1966–2009. *Journal of Personality and Social Psychology, 102*(5), 1045–1062.

Vecchione, M., & Caprara, G.V. (2009). Personality determinants of political participation: The contribution of traits and self-efficacy beliefs. *Personality and Individual Differences, 46*, 487-492.

Wallerstein, I. (1998). Uncertainty and creativity. *The American Behavioral Scientist, 42*(3), 320-322.

White, G.D. (2004). Political apathy disorder: Proposal for a new DSM diagnostic category. *Journal of Humanistic Psychology, 44*, 47-57.

Zhao, H., Seibert, S.E., & Hills, G.E. (2005). The mediating role of self-efficacy in the development of entrepreneurial intentions. *Journal of Applied Psychology, 90*(6), 1265-1272.

Apendiks

Sample Size = 104

Analisis Jalur dengan menggunakan LISREL (Pol_Part: Intensi Partisipasi Politik; Pol_Eff: Efikasi Politik; Pol_Exp: Pengalaman yang Perlu Untuk Berpolitik; Econ_Att: Sikap Terhadap Ilmu Ekonomi; Creat: Kreativitas)

Covariance Matrix

	Pol_Eff	Pol_Part	Pol_Exp	Econ_Att	Creat
Pol Eff	13.25				
Pol Part	27.15	305.71			
Pol_Exp	4.43	20.10	29.05		
Econ_Att	7.53	31.01	3.95	37.09	
Creat	12.37	58.41	18.27	19.11	208.18

Number of Iterations = 8

LISREL Estimates (Maximum Likelihood)

Structural Equations

Pol_Eff = 0.13*Pol_Exp + 0.19*Econ_Att, Errorvar.= 11.26, R² = 0.14
 (0.062) (0.055) (1.58)
 2.04 3.45 7.11

Pol_Part = 2.05*Pol_Eff, Errorvar.= 250.07, R² = 0.18
 (0.43) (35.19)
 4.72 7.11

Pol_Exp = 0.088*Creat, Errorvar.= 27.44, R² = 0.055
 (0.036) (3.86)
 2.43 7.11

Reduced Form Equations

Pol_Eff = 0.19*Econ_Att + 0.011*Creat, Errorvar.= 11.70, R² = 0.11
 (0.055) (0.0071)
 3.45 1.56

$$\text{Pol_Part} = 0.39 \cdot \text{Econ_Att} + 0.023 \cdot \text{Creat}, \text{ Errorvar.} = 299.20, R^2 = 0.020$$

(0.14)	(0.015)
2.79	1.48

$$\text{Pol_Exp} = 0.0 \cdot \text{Econ_Att} + 0.088 \cdot \text{Creat}, \text{ Errorvar.} = 27.44, R^2 = 0.055$$

(0.036)
2.43

Covariance Matrix of Independent Variables

	Econ Att -----	Creat -----
Econ Att	37.09 (5.22) 7.11	
Creat	19.11 (8.95) 2.14	208.18 (29.30) 7.11

Covariance Matrix of Latent Variables

	Pol_Eff -----	Pol_Part -----	Pol_Exp -----	Econ_Att -----	Creat -----
Pol Eff	13.14				
Pol Part	26.93	305.25			
Pol_Exp	4.00	8.19	29.05		
Econ_Att	7.25	14.85	1.68	37.09	
Creat	5.94	12.17	18.27	19.11	208.18

Goodness of Fit Statistics

Degrees of Freedom = 5
 Minimum Fit Function Chi-Square = 8.48 (P = 0.13)
 Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 8.24 (P = 0.14)
 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 3.24
 90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 15.30)

Minimum Fit Function Value = 0.082
 Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.032
 90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.15)
 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.080
 90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.17)
 P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.25

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.28
 90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.25 ; 0.40)
 ECVI for Saturated Model = 0.30
 ECVI for Independence Model = 0.82

Chi-Square for Independence Model with 10 Degrees of Freedom = 72.59

Independence AIC = 82.59
 Model AIC = 28.24
 Saturated AIC = 30.00
 Independence CAIC = 100.82
 Model CAIC = 64.68
 Saturated CAIC = 84.67

Normed Fit Index (NFI) = 0.88
 Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.89
 Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.44
 Comparative Fit Index (CFI) = 0.94
 Incremental Fit Index (IFI) = 0.95
 Relative Fit Index (RFI) = 0.77

Critical N (CN) = 184.27

Root Mean Square Residual (RMR) = 13.14
 Standardized RMR = 0.079
 Goodness of Fit Index (GFI) = 0.97
 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.91
 Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.32

Total and Indirect Effects

Total Effects of X on Y

	Econ Att	Creat
	-----	-----
Pol Eff	0.19 (0.05)	0.01 (0.01)
	3.45	1.56
Pol Part	0.39 (0.14)	0.02 (0.02)
	2.79	1.48
Pol Exp	- -	0.09 (0.04)
		2.43

Indirect Effects of X on Y

	Econ Att	Creat
	-----	-----
Pol Eff	- -	0.01 (0.01)
		1.56
Pol Part	0.39 (0.14)	0.02 (0.02)
	2.79	1.48
Pol_Exp	- -	- -

Total Effects of Y on Y

	Pol Eff	Pol Part	Pol Exp
	-----	-----	-----
Pol Eff	- -	- -	0.13 (0.06)
			2.04
Pol Part	2.05 (0.43)	- -	0.26 (0.14)
	4.72		1.87
Pol_Exp	- -	- -	- -

Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is 4.198

Indirect Effects of Y on Y

	Pol_Eff	Pol_Part	Pol_Exp
	-----	-----	-----
Pol_Eff	- -	- -	- -
Pol_Part	- -	- -	0.26 (0.14)
			1.87
Pol_Exp	- -	- -	- -

Time used: 0.000 Seconds